

The Effectiveness of E-Government on the Next Generation social welfare information System (SIKS-NG) as a Poverty Data Processing Application in Kedungpeluk Village

[Efektivitas E-Government Pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan di Desa Kedungpeluk]

Melly Nia Dwi Aprilia¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah ^{*2)}

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *The aim of this research is to determine and describe the effectiveness of E-Government in the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) as a Poverty Data Processing Application in Kedungpeluk Village. This study applies a qualitative descriptive. The focus of this research is the Effectiveness of E-Government in the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) as a Poverty Data Processing Application in Kedungpeluk Village. The results of this research show that the effectiveness of E-Government in the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) as a Poverty Data Processing Application in Kedungpeluk Village is viewed from indicators according to Budian, namely accuracy of program targets, program socialization, program objectives, and program monitoring. The results The first is the indicator of the accuracy of the program targets, namely the lack of detailed inspection by village officials regarding the real conditions of the existence of beneficiaries in Kedungpeluk village. Second, the indicator of program socialization is the lack of socialization or delivery of information by Kedung village officials regarding the existence of the SIKS-NG application to the community. Third, on the program objective indicators, namely, in implementing the E-Government system, you are required to consider the supporting Program Objectives, because if you do not consider the program objectives, then the policy in implementing the E-Government system is the Program Objectives. Assessing the effectiveness of the program based on the extent to which the program objectives have been set. can be achieved. Fourth, the program monitoring indicator, namely program monitoring, is important to ensure that the program is running in accordance with predetermined plans and identifying potential improvements that are needed*

Keywords *Pubic Service; E-government; Siks-ng*

Abstrak. *Tujuan dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas E-Government Pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan di Desa Kedungpeluk. Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas E-Government Pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan di Desa Kedungpeluk ditinjau dari indikator menurut Budian yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantaun program, Hasilnya yang pertama, pada indikator ketepatan sasaran program yaitu kurangnya pemeriksaan secara detail dari perangkat desa terhadap kondisi nyata dari keberadaan penerima manfaat yang ada di desa kedungpeluk. Kedua, pada indikator sosialiasi program yaitu Dengan kurangnya sosialisasi atau penyampaian informasi oleh perangkat desa kedung peluk mengenai adanya aplikasi SIKS-NG kepada masyarakat. Ketiga, pada indikator tujuan program yaitu Dalam penerapan sistem E-Government diharuskan untuk mempertimbangkan Tujuan Program yang mendukung, dikarenakan jika tidak mempertimbangkan tujuan program, dengan begitu kebijakan dalam menerapkan sistem E-Government tujuan Program Menilai efektivitas program berdasarkan sejauh mana tujuan program yang telah ditetapkan dapat tercapai. Keempat, pada indikator pemantauan program yaitu Pemantauan program penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi potensi perbaikan yang diperlukan.*

Kata Kunci – *Pelayanan Publik; E-government; Siks-Ng*

I. PENDAHULUAN

Pada era teknologi informasi dan komunikasi yang maju seperti saat ini, teknologi telah memberikan berbagai solusi bagi pelayanan publik untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satu solusi yang diharapkan dapat

meningkatkan pelayanan publik adalah penggunaan E-government di sektor birokrasi. E-government menjadi alternatif untuk mengembangkan birokrasi menuju penyajian yang lebih efektif. Namun, penggunaan E-government memerlukan darma kuat dari pemerintahan dalam menyusun dan mengawali inisiatif baru dalam bidang pemerintahan. Dalam upaya menerapkan E-government, persiapan SDM, sarana dan prasarana, regulasi, dan perkiraan menjadi hal yang sangat penting untuk dipersiapkan dengan matang. Sarana dan prasarana teknologi juga perlu diperbarui dan ditingkatkan untuk mendukung implementasi E-government dengan baik. Selain itu, regulasi yang jelas dan mendukung serta anggaran yang memadai juga harus disiapkan agar penerapan E-government dapat berjalan lancar dan berhasil. Dengan komitmen yang kuat dan persiapan yang matang, diharapkan penerapan E-government dapat membawa perubahan positif dalam birokrasi dan memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat [1].

E-government merupakan konsep pemanfaatan teknologi digital, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dalam bidang pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam sistem pelayanan kepada masyarakat. Implementasi E-government biasanya melalui beberapa tahap yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam menyediakan layanan publik. Tahap pertama adalah persiapan, di mana pemerintah merencanakan dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi digital dalam pelayanan publik. Tahap kedua adalah pematangan, dimana teknologi dan sistem E-government diimplementasikan dan diuji coba. Tahap ketiga adalah pematapan, dimana sistem dan layanan E-government dijalankan secara resmi dan terintegrasi dengan baik dengan seluruh instansi pemerintahan terkait. Tahap terakhir adalah pemanfaatan, dimana teknologi dan sistem E-government telah berfungsi secara optimal untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, diharapkan penerapan E-government dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan responsivitas pelayanan publik. Hal ini akan membawa manfaat bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan pemerintah yang lebih baik dan efisien [2]. Penggunaan sistem E-government diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam sistem pemerintahan. Definisi *E-government* yang disampaikan oleh Budi Rianto sesuai dengan konsep yang umum diterima. E-Government merupakan penerapan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan tugas dan tatalaksana pemerintahan. Melalui aplikasi E-Government, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyediakan layanan publik serta memperkuat hubungan antar instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Secara umum, E-government diartikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan layanan pemerintah agar semakin lebih baik.

Dalam implementasi E-government, diharapkan pemerintahan sanggup mengadopsi teknologi digital untuk mengoptimalkan proses administrasi, memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, E-government juga dapat memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memungkinkan akses informasi yang lebih mudah bagi masyarakat. Dengan penerapan E-government yang baik, diharapkan pemerintah dapat bergerak menuju pelayanan yang lebih responsif, terbuka, dan partisipatif. Hal ini akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan masyarakat yang lebih puas dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah.

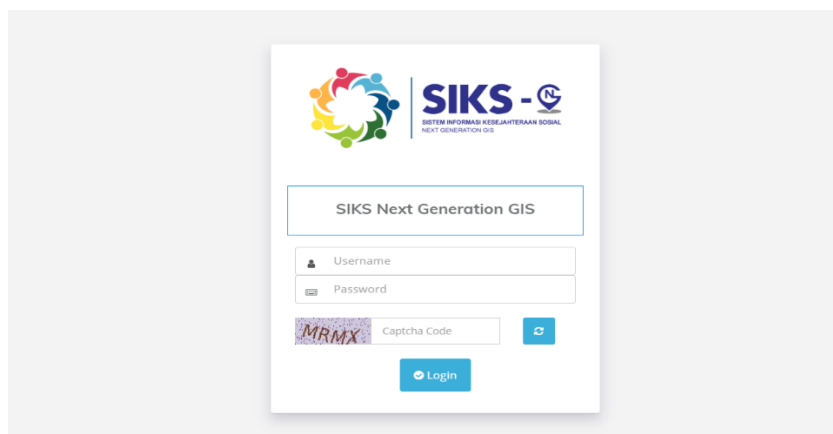
Efektivitas bisa diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau rencana yang telah dibuat. Cara mengukur efektivitas adalah dengan perbandingan diantara yang telah direncanakan atau diharapkan atas hasil jelas yang nyata dan terwujud. Dalam konteks pemerintahan, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana program dan kebijakan yang telah dirancang dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, serta seberapa besar dampaknya bagi masyarakat dan pelayanan publik. Sedangkan dalam dunia bisnis, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana perusahaan dapat mencapai target keuangan dan non-keuangan yang telah ditentukan. Penting untuk memahami bahwa efektivitas mudah dilihat dari berbagai sudut pandang, terlihat dari siapa yang menilainya dan mengartikannya. Pengukuran efektifitas yang akurat dan relevan perlu melibatkan berbagai parameter dan indikator yang sesuai dengan tujuan dan konteks tertentu. Dalam mengupayakan efektivitas, penting bagi organisasi atau pemerintah untuk memiliki rencana yang jelas dan terukur, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, organisasi atau pemerintah dapat terus beradaptasi dan meningkatkan kinerja mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau pelanggan dengan lebih baik pula [3]. Efektivitas dapat diukur melalui pertimbangan antara upaya atau prosedur kerja yang dilakukan dengan kapasitas atau hasil yang telah dicapai, serta pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa efektivitas bukan hanya tentang melihat keadaan akhir atau hasil akhir suatu program atau tindakan. Efektifitas adalah proses yang berkelanjutan dan saling berkaitan satu sama lain. Evaluasi efektifitas seharusnya mencakup seluruh tahapan dan aspek pelaksanaan program, termasuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi hasil. Dalam konteks E-government, efektivitas dapat dilihat sebagai hasil dari implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang bertujuan untuk mengetahui data kemiskinan agar tepat sasaran dan memiliki tujuan yaitu dengan melihat pelayanan yang dilakukan dalam program SIKS-NG disesuaikan dengan prioritas penerima manfaat masyarakat yang tidak

mampu sehingga dalam pelayanan yang berkaitan dengan program SIKS-NG ini dapat sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Dalam menaikkan kondisi keselamatan sosial masyarakat, termasuk perihal ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mutu hidup masyarakat. Efektivitas E-government diukur melalui sejauh mana SIKS-NG dapat mempermudah pengolahan data kemiskinan di Desa Kedungpeluk dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam mencapai efektivitas, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna memastikan bahwa program atau tindakan yang dilakukan dengan serasi tujuan yang telah ditetapkan dan menyampaikan keuntungan yang maksimal bagi masyarakat [4].

Teori menurut Budiani menyatakan bahwa ada empat faktor penting dalam evaluasi efektivitas suatu program yaitu (1) Ketepatan sasaran program: Program yang diluncurkan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengguna program. Artinya program ini harus ditujukan kepada kelompok atau individu yang memang membutuhkan dan dapat mendapatkan manfaat dari program tersebut. (2) Sosialisasi Program: Menyatakan bahwa keberhasilan program juga tergantung pada sejauh mana program tersebut dikenal dan dipahami oleh target sasaran. Sosialisasi program memastikan bahwa target sasaran memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan dan manfaat dari program yang diluncurkan. (3) Tujuan Program: Menilai efektivitas program berdasarkan sejauh mana tujuan program yang telah ditetapkan dapat tercapai. Program dianggap efektif jika berhasil mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. (4) Pemantauan Program: Merupakan aktivitas untuk memantau dan mengevaluasi jalannya program secara berkala. Pemantauan program penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi potensi perbaikan yang diperlukan [5].

Kemampuan pemerintah dalam menyusun rencana program merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. Partisipasi kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan juga perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang diberikan. Penggunaan indikator strategis seperti tingkat kemiskinan membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. *Badan Pusat Statistik* (BPS) menggunakan pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam menghitung tingkat kemiskinan. Konsep kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan dari sudut pandang ekonomi, yang diukur dari segi pengeluaran atau akses terhadap pangan, akses terhadap kebutuhan dasar. Data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan Pengeluaran (SUSENAS KP). Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa semua lembaga yang bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, diwajibkan untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan mereka masing-masing. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia dan mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini merupakan tampilan awal aplikasi dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation:

Gambar 1. Halaman awal website SIKS-NG



Sumber: Diolah peneliti dari desa Kedungpeluk tahun 2023

Gambar diatas merupakan halaman awal website SIKS-NG. Website ini hanya bisa diakses oleh perangkat desa yang menjabat sebagai kepala seksi kesejahteraan di desa Kedungpeluk. Penerapan SIKS-NG adalah sebuah platform online yang digunakan dalam ngelolah serta memperbarui data Basis Data Terpadu (BDT) dan juga Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Aplikasi ini memungkinkan desa-desa untuk mengakses blangko data BDT dan KKS yang kemudian akan dilakukan proses verifikasi dan validasi. Proses verifikasi dan validasi

BDT bertujuan untuk menentukan rumah tangga yang memenuhi syarat dan layak untuk menerima program bantuan sosial. Data - data rumah tangga akan diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan kevalidan informasi yang tercatat. Rumah tangga yang memenuhi kriteria akan diakui sebagai penerima manfaat dari program bantuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, proses verifikasi KKS bertujuan untuk memperbaiki dan memperbaharui informasi mengenai kepesertaan program bantuan sosial pangan (KKS/RASTRA/BPNT). Data kartu keluarga akan diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan bahwa keluarga yang berhak menerima program bantuan sosial telah terdaftar dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG, proses verifikasi dan validasi menjadi lebih efisien dan terstruktur. Data yang telah terverifikasi dan divalidasi dengan baik akan memastikan bahwa program bantuan sosial tepat sasaran dan mencapai keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Hal ini akan membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif untuk mendukung pelayanan sosial yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 57/Huk/2017 tentang penerapan data terpadu program penanganan fakir miskin tahun 2017, setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi dan validasi data setiap dua tahun sekali. Peran aktif pemerintah desa dan kelurahan sangat krusial karena menjadi kunci dalam menyalurkan bantuan sosial agar tepat sasaran dalam program penanganan fakir miskin. Program Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) adalah aplikasi manajemen dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang digunakan untuk mengusulkan data baru berbasis data terpadu mengenai masyarakat miskin. Kementerian Sosial RI menerapkan sistem satu data terpadu nasional dalam penyaluran bantuan sosial bagi penerima manfaat dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKS-NG. Salah satu tabel data DTKS Kedungpeluk di Kota Sidoarjo yang telah menggunakan aplikasi SIKS-NG sejak tahun 2018.

Tabel 1. Rekapitulasi Data DTKS Kedungpeluk pada tahun 2021-2022

No.	Bulan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Jumlah Individu	Jumlah Keluarga	Perbaikan	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga	Perbaikan
1.	Januari	-	-	-	1.002	472	0
2.	Februari	-	-	-	1.006	471	42
3.	Maret	-	-	-	1.006	471	42
4.	April	1.122	466	1.122	1.001	466	42
5.	Mei	1.124	466	337	1.001	466	42
6.	Juni	1.117	466	333	1.003	465	42
7.	Juli	1.066	474	161	1.006	469	42
8.	Agustus	1.207	480	161	1.029	480	42
9.	September	1.207	480	161	1.032	481	42
10.	Oktober	1.129	455	159	1.032	481	42
11.	November	1.002	472	0	1.026	477	41
12.	Desember	1.002	472	0	1.025	476	46

Sumber: Diolah peneliti dari desa Kedungpeluk tahun 2023

Berdasarkan dengan tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa (DTKS) *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demograsi dari penduduk Indonesia yang memiliki status kesejahteraan terendah. DTKS digunakan untuk membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, serta memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Proses pengelolaan DTKS ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat fakir miskin. Dengan menggunakan sistem informasi seperti aplikasi SIKS-NG, diharapkan proses ini dapat dilakukan dengan tepat sasaran, data diatas menjelaskan bahwasannya Penerima manfaat program SIKS-NG di Desa Kedungpeluk pada tahun 2021 menunjukkan lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 menunjukkan angka 5.675 yang terdaftar SIKS-NG. Ketepatan sasaran digunakan untuk membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, serta memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. lebih terstruktur, efisien, dan akurat. Dapat dilihat dari hasil dalam tabel data tersebut pada tahun 2021 tidak stabil pada setiap bulannya karena masih terdapat perbaikan yang tidak terupdate. Sedangkan pada tahun 2022 setiap bulannya stabil namun terdapat kenaikan bahkan penurunan yang ditunjukkan dalam jumlah individu dan jumlah keluarga, sedangkan dalam data perbaikan berjalan stabil pada bulan Februari-Oktober dengan jumlah 42 perbaikan dan mengalami penurunan pada bulan November dengan jumlah 41 perbaikan dan pada bulan Desember mengalami kenaikan dengan jumlah 46 perbaikan. Pada kenaikan disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mengalami krisis sosial,ekonomi dan demograsi. Sedangkan penurunan disebabkan oleh masyarakat yang sudah mengalami kesejahteraan sosial dalam hal perekonomian dan demograsi. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap bulan mengalami

perubahan dalam jumlah individu dan jumlah keluarga yang terdapat di desa Kedungpeluk pada tahun 2022. Penelitian ini mempunyai tujuan yang menggambarkan dan dideskripsikan efektivitasnya *e-government* melalui aplikasi SIKS-NG agar pengambilan data lebih terstruktur efisien dan akurat. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah perangkat desa dalam pengumpulan data bantuan masyarakat yang kurang mampu dan mempermudah dalam pengumpulan data masyarakat miskin untuk menerima bantuan sosial yang ada di salah satu desa yang berada di Kabupaten Sidoarjo yakni desa kedungpeluk. Untuk tercapainya pengolahan data dan bantuan sosial terhadap masyarakat miskin.

Dalam penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi untuk membandingkan sebuah penelitian. Adapun referensi terdahulu yang digunakan oleh penelitian lainnya sebagai acuan dalam mengkaji penelitian antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Diah Purnamawati, Suyeno, dan Hirshi Anadza pada tahun 2022, berjudul “Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto)”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan membantu meningkatkan efektivitas implementasi serta kualitas pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Mojokerto. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program aplikasi Si-Mojo dalam meningkatkan pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Mojokerto secara umum sudah berjalan dengan baik dan efektif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya belum maksimal.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Haromin dan Dhika Andriyansah pada tahun 2022, berjudul “Efektivitas Penerapan E-Government melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung”. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa kendala dalam implementasi SIKS-NG terkait dengan indikator adaptasi, pencapaian tujuan, dan integrasi pengetahuan masyarakat. Kendala pada indikator adaptasi meliputi kurangnya perhatian dari pihak desa terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan SIKS-NG. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perhatian lebih dari pihak desa agar sarana dan prasarana dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan sehingga pelaksanaan SIKS-NG dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Kendala pada indikator pencapaian tujuan meliputi masalah dalam pendataan yang belum diverifikasi secara langsung ke lapangan, yang berpotensi menyebabkan kesalahan atau ketidakakuratan dalam data penerima bantuan. Untuk mengatasi ini, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keakuratan dan validitas data. Kendala pada indikator integrasi pengetahuan masyarakat meliputi kurangnya efektivitas sosialisasi dan edukasi mengenai SIKS-NG, sehingga masyarakat kurang memahami dan memanfaatkan aplikasi ini secara optimal. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, pemerintah desa perlu meningkatkan perhatian dan komitmen dalam mengoptimalkan penggunaan SIKS-NG, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan aplikasi ini. Selain itu, pendataan yang lebih akurat dan verifikasi lapangan dapat membantu meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga implementasi SIKS-NG dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan [6].

Ketiga, yang dilakukan oleh Ahmad Lauhil Mahfudz, dan Siti Nuraini pada tahun 2022, yang berjudul “Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) Oleh Dinas Sosial Dalam Penanganan Kemiskinan Di Kota Bekasi”. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi dalam ketiga bidang tersebut, dan perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pelayanan dan akses masyarakat fakir miskin dalam hal tersebut. Kemungkinan kendala ini berkaitan dengan akses dan konektivitas teknologi yang mungkin masih terbatas di daerah mereka. Untuk meningkatkan pencapaian, diperlukan upaya untuk memperluas jaringan dan meningkatkan akses teknologi di daerah-daerah yang terdampak. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam proses pemantauan dan pelayanan, yang mungkin memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap program dan layanan yang diberikan. Juga perlu dilakukan perbaikan dalam proses pemantauan untuk memastikan layanan yang diberikan lebih efektif, transparan, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Melibatkan masyarakat fakir miskin dalam proses perencanaan dan evaluasi program juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh mereka, sehingga solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan dapat ditemukan [7].

Keempat, Penelitian tersebut yang dilakukan oleh Cici Malitha Wulandari (2019), yang berjudul “Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Sippadu) Di Kabupaten Kuantan Singingi”. pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus pada infrastruktur jaringan *DPMPTSP*. Pemberian jaringan tersendiri yang terpisah dari Kantor Bupati dapat membantu mengurangi gangguan jaringan dan meningkatkan kecepatan dan stabilitas jaringan. Selain itu, perlu dilakukan pemeliharaan dan pengawasan rutin terhadap jaringan untuk memastikan kualitas dan ketersediaan layanan jaringan. Selain itu, perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada petugas *DPMPTSP* dalam mengoperasikan dan memanfaatkan sistem informasi perizinan terpadu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem dan penerapan praktik terbaik dalam penggunaan sistem, proses perizinan dapat ditingkatkan lebih efisien dan akurat. Kolaborasi dengan penyedia layanan jaringan juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul. Dengan upaya

bersama dari pemerintah daerah, penyedia layanan jaringan, dan petugas DPMPTSPK, diharapkan kendala terkait jaringan dapat diatasi, dan sistem informasi perizinan terpadu dapat berfungsi secara lebih efektif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pemohon perizinan [8].

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu tersebut, kini juga terjadi pada hasil temuan observasi di Desa Kedungpeluk yaitu Efektivitas E-Government Melalui Aplikasi SIKS-NG. Hasil temuan observasi di desa kedungpeuk terdapat beberapa permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi atau penyampaian informasi oleh perangkat desa kedung peluk mengenai adanya aplikasi SIKS-NG kepada masyarakat. sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya aplikasi SIKS-NG digunakan untuk pengajuan bantuan sosial dari kementerian sosial RI bagi masyarakat tidak mampu didesa kedungpeluk. Kurangnya pemeriksaan secara detail dari perangkat desa terhadap kondisi nyata dari keberadaan penerima manfaat yang ada di desa kedungpeluk. Hal ini disebabkan oleh tidak dilakukannya pengamatan/observasi oleh perangkat desa terhadap kondisi dilapangan. Bahwasannya dengan adanya sistem aplikasi SIKS-NG ini dapat mempermudah perangkat desa dalam pengumpulan data bantuan masyarakat yang kurang mampu dan mempermudah dalam pengumpulan data masyarakat miskin untuk menerima bantuan sosial agar tepat sasaran, yang ada di salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yakni Desa Kedungpeluk yang telah menerapkan pelayanan bantuan secara online melalui sistem SIKS-NG yaitu Pemerintah desa Kedungpeluk. *SIKS-NG* merupakan App's yang sudah dikelola oleh kesejahteraan desa tersebut. Pada sistem aplikasi *SIKS-NG* mempunyai fungsi sebagai penyimpanan data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi.

II. METODE

Penelitian mengenai efektivitas E-Government melalui aplikasi SIKS-NG menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau keadaan yang sedang diteliti tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian terhadap variabel-variabelnya. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang ada pada satu waktu tertentu, sehingga peneliti dapat memahami dan menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan berusaha untuk menjelaskan bagaimana aplikasi SIKS-NG bekerja dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang mendalam dan kaya tentang proses, pengalaman, dan pandangan para pemangku kepentingan terkait dengan aplikasi SIKS-NG. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas E-Government melalui aplikasi SIKS-NG dan memberikan wawasan berharga bagi pengembangan dan perbaikan ke depannya [9]. Adapun informan pada penelitian ini ditentukan secara purposive sampling. Menurut sugiyono (2014:301), Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan tujuan atau tujuan tertentu dalam penelitian. Dalam metode purposive sampling, peneliti memilih partisipan atau unit sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari menggunakan teknik purposive sampling adalah untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang dianggap penting dan relevan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang terlibat adalah Kasi Kesra, Kaur Perencanaan, dan staf operator di Pemerintah Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki keterkaitan langsung dengan aplikasi SIKS-NG berbasis website. Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari responden tentang efektivitas E-Government melalui aplikasi SIKS-NG. Selain wawancara, data primer juga dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap proses dan keadaan terkait implementasi aplikasi SIKS-NG. Data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, melalui studi dokumentasi. Ini mencakup pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan implementasi dan efektivitas aplikasi SIKS-NG dari berbagai sumber seperti laporan, catatan, dan dokumen lainnya. Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis data sesuai dengan pendekatan Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas. Model interaktif Miles dan Huberman memungkinkan analisis yang mendalam dan komprehensif. Proses analisis yang terus-menerus dan interaktif memastikan data dianalisis secara menyeluruh dan mendalam, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana orang menghas ilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Memiliki arti apabila suatu pekerjaan dapat dis eles aikan s es uai dengan perencanaan,

baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu proses yang sesuai dengan perencanaannya maka proses tersebut akan berjalan dengan baik dan efektif dalam pekerjaannya [11]. Menurut Mahmudi, efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu proses kegiatan dikatakan efektif apabila berhasil mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan yang ditetapkan. Semakin besar output yang dihasilkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi [12]. Untuk mengetahui lebih lanjut dari keberhasilan pada efektivitas E-government SIKS-NG yang diterapkan di pemerintah Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini telah melakukan kegiatan observasi dan wawancara, terhadap keberhasilan aplikasi Efektivitas *E-government* pada '*Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation*' (SIKS-NG) mewujudkan aplikasi yang dapat mengelola data kemiskinan Di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo diukur dengan teori Efektivitas dari Budiani dengan 4 indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program yang dijelaskan sebagai berikut:

A. Ketepatan Sasaran

SIKS-NG bertujuan untuk mengusulkan warga ke dalam DTKS yang menerima bantuan pemerintah, bahwasannya dalam pengisian data harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan agar penyaluran program bantuan dari Kementerian Sosial tepat sasaran. Ketepatan Sasaran Program yang diluncurkan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengguna program. Yang artinya program ini harus ditujukan kepada kelompok atau individu yang memang membutuhkan dan dapat mendapatkan manfaat dari program tersebut [13]. Dalam riset ini kepastian bagi siapapun sarannya dalam program SIKS-NG dimana hal ini merupakan komunitas sasaran program yang terdiri dari masyarakat yang kurang mampu di desa kedungpeluk, kecamatan candi, kabupaten sidoarjo.

Berdasarkan dari hasil survei ketepatan sasaran program yang dilakukan dengan aparat Pemerintah desa Kedungpeluk dapat disimpulkan bahwasannya penerapan *E-government* sangat membutuhkan ketepatan sasaran program yang dimana sebagai kekuatan hukum, penerapan *E-government* memiliki landasan hukum pelaksanaannya yang diimbangi dengan regulasi yang ada merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa semua lembaga yang bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, diwajibkan untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan mereka masing-masing.

Kurangnya pemeriksaan detail oleh perangkat desa terhadap kondisi nyata penerima manfaat di Desa Kedungpeluk menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan. Hal ini disebabkan oleh tidak dilakukannya pengamatan langsung oleh perangkat desa terhadap kondisi di lapangan. Pemerintah desa sebaiknya mengumpulkan data dengan melakukan observasi langsung agar ada interaksi dengan masyarakat sehingga tercipta data valid yang tepat sasaran.

Berdasarkan informasi dari para informan, Program SIKS-NG diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi pemberdayaan fakir miskin dengan memberikan bantuan dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kurang mampu. Ketepatan sasaran program SIKS-NG dijelaskan oleh Bapak Masduqi Zakariya, penanggung jawab SIKS-NG, yang mengatakan bahwa program ini sangat jelas membantu memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dengan menyesuaikan bantuan sosial dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut (Hasil wawancara, 7 Maret 2023).

Selain itu, Bapak M. Rudiansyah, kepala dusun Kedungsari Desa Kedungpeluk, juga menyatakan bahwa program SIKS-NG diharapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat kurang mampu. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu dari Diah Purnamawati, Suyeno, dan Hirshi Anadza pada tahun 2022, yang meneliti "Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto)." Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program aplikasi Si-Mojo dalam meningkatkan pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Mojokerto secara umum sudah berjalan dengan baik dan efektif, meskipun masih ada beberapa indikator yang belum maksimal.

B. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah kemampuan pelaksanaan program untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan program kepada peserta sasaran [14]. Indikator sosialisasi program pada aplikasi SIKS-NG dinilai belum maksimal dalam penggunaannya bagi perangkat desa di Desa Kedungpeluk, Sidoarjo. Dalam penerapan sistem E-Government, penting untuk mempertimbangkan sosialisasi program yang mendukung, karena tanpa sosialisasi yang memadai, kebijakan dalam menerapkan sistem e-government belum bisa dikatakan optimal.

Keberhasilan program juga tergantung pada sejauh mana program tersebut dikenal dan dipahami oleh target sasaran. Sosialisasi program memastikan bahwa target sasaran memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan dan manfaat dari program yang diluncurkan. Kurangnya sosialisasi atau penyampaian informasi oleh perangkat Desa Kedungpeluk mengenai aplikasi SIKS-NG menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya aplikasi ini untuk pengajuan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI bagi masyarakat tidak mampu di Desa Kedungpeluk.

Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program. Oleh karena itu, sosialisasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang terencana dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik. Dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, maksud dan tujuan dari program SIKS-NG dapat diketahui bersama oleh warga Desa Kedungpeluk.

Sosialisasi program SIKS-NG dapat diketahui, dari hasil wawancara dengan Bapak Masduqi Zakariya selaku penanggung jawab SIKS-NG

“Untuk Sosialisasi program SIKS-NG ini memang tidak ada sosialisasi di kantor Desa Kedungpeluk. Hal ini dikarenakan jika program tersebut disosialisasikan kepada warga maka saya takutkan apabila warga tiba-tiba datang ke balaidesa untuk pengajuan sendiri. Sehingga diputuskan untuk tidak melakukan sosialisasi jadi saya mendapatkan data para waraga melalui Kepala Dusun”(Hasil Wawancara pada tanggal 9 Maret 2023)

Dalam hasil wawancara informan selanjutnya yaitu Bapak M. Rudiansyah selaku kepala dusun Kedungsari desa Kedungpeluk yang mengatakan,

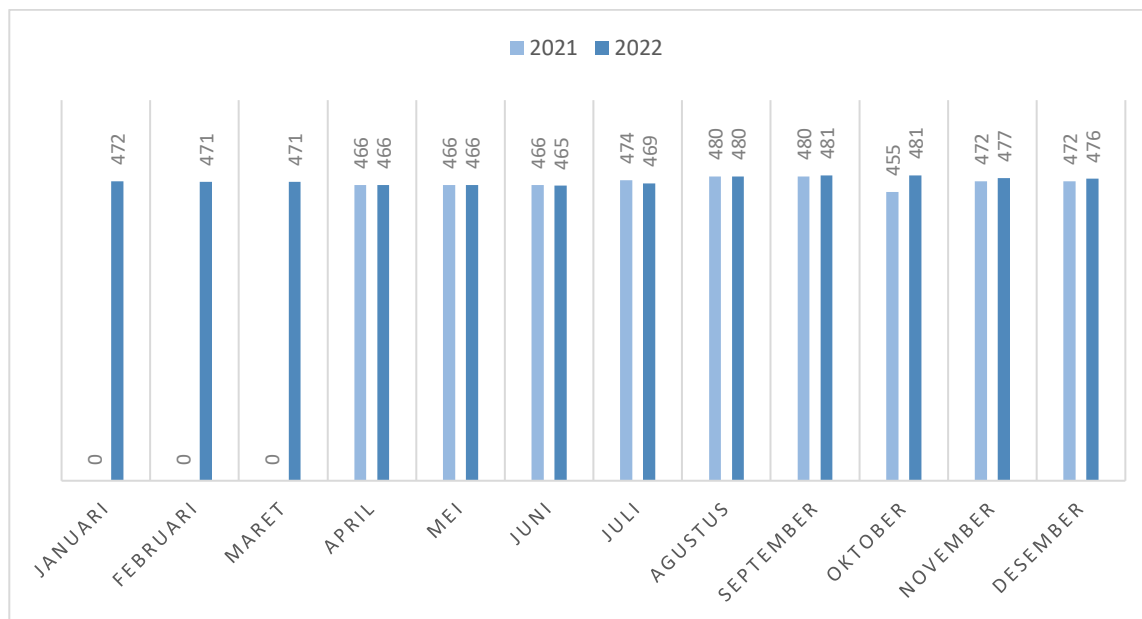
“jadi gini mbk kalok SIKS-NG ini dari pihak desa memang tidak melakukan sosialisasi karena jika melakukan sosialisasi ditakutkan warga yang mampu minta didata untuk mendapatkan bantuan, jadi pihak desa khususnya kasun-kasun mendata sendiri warga yang kurang mampu”(Hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan di atas, diketahui bahwa sosialisasi tidak dilakukan karena ada kekhawatiran bahwa masyarakat akan mengajukan bantuan sendiri. Oleh karena itu, diputuskan untuk tidak melakukan sosialisasi. Penelitian yang telah dilakukan mendukung temuan ini, dengan mengacu pada kajian penelitian terdahulu dari Diah Purnamawati, Suyeno, dan Hirshi Anadza pada tahun 2022, yang berjudul “Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi untuk mempublikasikan Si-Mojo dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan website. Selain itu, DPMPSTP Kota Mojokerto juga mengadakan bimbingan teknis gabungan di kecamatan dan menyediakan petugas khusus di front office untuk membantu pemohon dalam menggunakan aplikasi Si-Mojo. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan melalui aplikasi Si-Mojo. Pada penelitian ini, sosialisasi dilakukan dengan lancar, berbeda dengan penelitian saat ini di mana sosialisasinya tidak berjalan lancar karena kekhawatiran warga akan mengajukan sendiri untuk menjadi penerima manfaat SIKS-NG.

C. Tujuan Program

Dalam penerapan sistem E-Government diharuskan untuk mempertimbangkan Tujuan Program yang mendukung, dikarenakan jika tidak mempertimbangkan tujuan program, dengan begitu kebijakan dalam menerapkan sistem E-Government tujuan Program Menilai efektivitas program berdasarkan sejauh mana tujuan program yang telah ditetapkan dapat tercapai. Program dianggap efektif jika berhasil mencapai hasil yang diharapkan sama dengan tujuan yang sudah ditentukan ini [15]. Hal tersebut dapat diketahui melalui hasil olah data rekapitulasi data ketepatan sasaran program SIKS-NG Desa Kedungpeluk tahun 2021-2022 sebagai berikut.

Gambar 2. hasil olah data rekapitulasi data ketepatan sasaran program SIKS-NG Desa Kedungpeluk tahun 2021-2022



Sumber: Diolah peneliti dari desa Kedungpeluk tahun 2023

Berdasarkan Gambar diatas menjelaskan bahwasannya Penerima manfaat program SIKS-NG di Desa Kedungpeluk pada tahun 2021 menunjukkan lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 menunjukkan angka 5.675 yang terdaftar SIKS-NG. Ketepatan sasaran digunakan untuk membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, serta memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Proses pengelolaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat fakir miskin. Dengan menggunakan sistem informasi seperti aplikasi SIKS-NG, diharapkan proses ini dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, efisien, dan akurat. Dapat dilihat dari hasil dalam diagram data tersebut pada tahun 2021 tidak stabil pada setiap bulannya karena masih terdapat perbaikan yang tidak terupdate. Sedangkan pada tahun 2022 setiap bulannya stabil namun terdapat kenaikan bahkan penurunan yang ditunjukkan dalam jumlah penerima manfaat. Pada kenaikan disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mengalami krisis sosial, ekonomi dan demografi. Sedangkan penurunan disebabkan oleh masyarakat yang sudah mengalami kesejahteraan sosial dalam hal perekonomian dan demografi. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap bulan mengalami perubahan dalam jumlah penerima manfaat yang terdapat di desa Kedungpeluk pada tahun 2022.

Tujuan program SIKS-NG dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Masduqi Zakariya selaku penanggung jawab SIKS-NG yang menyatakan:

“Untuk mencapai tujuan dalam program SIKS-NG dengan melihat pelayanan yang dilakukan untuk program SIKS-NG disesuaikan dengan prioritas penerima manfaat yaitu masyarakat yang tidak mampu sehingga tentunya dalam pelayanan yang berkaitan dengan program SIKS-NG ini dapat sesuai dengan porsi dan kebutuhannya” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2022).

Selain itu, Bapak Edii selaku penanggung jawab kedua di Desa Kedungpeluk mengatakan:

“Sebenarnya dengan adanya program SIKS-NG dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memudahkan kita selaku perangkat desa untuk mengetahui data dan informasi mengenai penerima manfaat di Desa Kedungpeluk” (Hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan di atas, diketahui bahwa tujuan program SIKS-NG adalah untuk memudahkan perangkat desa di Desa Kedungpeluk dan Dinas Sosial dalam mengetahui data dan informasi mengenai penerima manfaat di Desa Kedungpeluk. Namun, tidak ada kunjungan yang dilakukan pihak desa terhadap rumah tangga miskin atau orang tidak mampu yang termasuk dalam program pemutakhiran data melalui

SIKS-NG. Hal ini menyebabkan perangkat desa tidak sepenuhnya mengetahui keadaan sebenarnya, yang mengakibatkan bantuan sosial tidak tepat sasaran dan program tidak efektif.

Penelitian yang telah dilakukan mendukung temuan ini, dengan mengacu pada kajian penelitian terdahulu dari Diah Purnamawati, Suyeno, dan Hirshi Anadza pada tahun 2022, yang berjudul “Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan program Si-Mojo adalah untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan. Pada penelitian ini, sosialisasi dilakukan dengan lancar, berbeda dengan penelitian sekarang di mana sosialisasi tidak berjalan lancar karena kekhawatiran warga akan mengajukan sendiri untuk menjadi penerima manfaat SIKS-NG.

Pada penelitian saat ini, tujuan program SIKS-NG adalah untuk mempermudah Dinas Sosial dalam mendapatkan dan mengumpulkan data valid mengenai masyarakat penerima manfaat bantuan

D. Pemantauan Program

Pemantauan program adalah tindakan yang dilakukan setelah program dijalankan, menunjukkan perhatian pada peserta program seiring dengan penggunaan aplikasi SIKS-NG. Pengawas aplikasi SIKS-NG dari dinas sosial sudah melakukan pemantauan terhadap aplikasi tersebut. Dalam menerapkan sistem E-Government, penting untuk mempertimbangkan Pemantauan Program yang mendukung. Tanpa memperhitungkan pemantauan program, kebijakan dalam menerapkan sistem E-Government bisa terganggu. Pemantauan program adalah kegiatan yang bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi jalannya program secara teratur. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan yang diperlukan [16].

Informasi mengenai Pemantauan Program SIKS-NG dapat diperoleh dari wawancara dengan Bapak Masduqi Zakariya, yang bertanggung jawab atas SIKS-NG.

“Menurut wawancara dengan Operator SIKS-NG pada tanggal 9 Maret 2023, pihak dinas sosial secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program SIKS-NG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Namun, kegiatan ini hanya dilakukan sekali, dan selanjutnya pelaporan data dilakukan secara online.”

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa pemantauan program SIKS-NG dilakukan secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan turun langsung ke lapangan, namun evaluasi kemudian dilakukan secara online. Pada saat melakukan pemantauan program tidak adanya jadwal yang terprogram sehingga pemantauan program sewaktu-waktu. Namun, ada penilaian bahwa prosedur ini belum efektif karena minimnya pemantauan terhadap Operator SIKS-NG dalam menjalankan program pemuktakhiran data di desa.

Penelitian sebelumnya oleh Diah Purnamawati, Suyeno, dan Hirshi Anadza pada tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto)” juga menunjukkan bahwa program aplikasi Si-Mojo melakukan pemantauan program. Ada kelompok khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, serta dilakukan evaluasi sederhana dalam kelompok tersebut sebagai upaya pemantauan tambahan.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan hasil, dapat disimpulkan tentang pengenalan sistem administrasi elektronik yang bekerja dengan efisiensi administrasi elektronik pada sistem informasi jaminan sosial generasi berikutnya (SIKS-NG) sebagai aplikasi pengolahan data masyarakat miskin. Desa Kedungpeluk. bahwa: 1) Indikator tujuan program, yaitu. keakuratan program Harus ditujukan kepada kelompok atau individu yang benar-benar membutuhkan program dan akan memperoleh manfaat darinya. Dalam penelitian ini akurasi menentukan siapa saja kelompok sasaran program SIKS-NG yang dalam hal ini adalah kelompok sasaran program yang terdiri dari masyarakat kurang mampu di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. 2) Sosialisasi program, Sosialisasi program mengatakan bahwa keberhasilan program juga tergantung pada seberapa besar kelompok sasaran mengetahui dan memahami program tersebut. Sosialisasi program memastikan bahwa khalayak sasaran mempunyai pemahaman yang baik mengenai tujuan dan manfaat program yang diluncurkan. Sosialisasi program SIKS-NG di Desa Kedungpeluk kurang efektif, hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi antara perangkat desa dengan warga

penerima manfaat. 3) Tujuan program Untuk mencapai tujuan program SIKS-NG, meninjau kembali layanan yang ditawarkan pada program SIKS-NG sesuai dengan prioritas masyarakat miskin, sehingga layanan terkait program SIKS-NG selaras secara alami. dengan bagian dan kebutuhan. 4) Pemantauan program merupakan fungsi yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan program secara berkala. Pemantauan program penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. Hasil survei di atas dilanjutkan dengan pemantauan langsung di lapangan dan kemudian pemantauan program secara online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah –Nya yang telah membimbing langkah-langkah saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa juga selawat serta salam ditujukan kepada nabi besar Muhammad SAW. Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada pihak yang sudah membantu dan terlibat dalam menyelesaikan penulisan artikel ini serta kepada seluruh jajaran Perangkat Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu memberikan informasi dalam melengkapi data informasi dalam penulisan artikel ini.

REFERENSI

- [1] Fredy and Keifer, “Teknologi Informasi BAB,” *Angew. Chemie Int. Ed.*, pp. 9–27, 1967, [Online]. Available: [http://repository.uin-suska.ac.id/4301/3/BAB II%28%29.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/4301/3/BAB%20II%2028%2029.pdf)
- [2] L. Muliawaty and S. Hendryawan, “Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang),” *Kebijak. J. Ilmu ...*, vol. 11, pp. 101–112, 2020, [Online]. Available: <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2898%0Ahttps://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/download/2898/1285>
- [3] Elok, “Samisade,” *Government*, vol. 3, p. 15, 2024, [Online]. Available: <http://hsgdayada.co.id>
- [4] A. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Siks-Ng Untuk Pengolahan Data Kemiskinan Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo,” *Pap. Knowl. Towar. a Media Hist. Doc.*, pp. 1–20, 2014.
- [5] F. Dimas Mahendra, A. Ambarwati, and W. Taufik Raharja, “Efektivitas Program Pembagian Lima Ribu Masker Desa Pesanggrahan Kota Batu,” *J. Adm. Publuk dan Ilmu Komun.*, vol. 9, no. 1, pp. 10–16, 2022, doi: 10.55499/intelektual.v9i1.62.
- [6] D. A. Haromin, “Efektivitas penerapan e-government melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (siks-ng) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan di desa lamajang kecamatan pangalengan kabupaten bandung,” *J. Jisipol*, vol. 6 Nomor 3, no. November, pp. 34–56, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/958/796>
- [7] A. L. ; N. Mahfudz, “Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Layanan,” no. 10, pp. 46–62, 2022.
- [8] “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” *J. Sains dan Seni ITS*, vol. 6, no. 1, pp. 51–66, 2017, [Online]. Available: <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- [9] A. M. Asrandi T, S. A. Wati, A. Wahab, and A. Alfian, “Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesmas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan,” *J. Indones. Sos. Sains*, vol. 3, no. 9, pp. 1294–1305, 2022, doi: 10.36418/jiss.v3i09.695.
- [10] U. Aryanto, “Metode Penelitian,” *Metod. Penelit.*, no. 1, pp. 32–41, 2018.
- [11] T. J. et al James W, Elston D, “Tinjauan Penelitian,” *Andrew’s Dis. Ski. Clin. Dermatology.*, pp. 16–38, 20AD.
- [12] N. Stocks, “濟無No Title No Title No Title,” pp. 1–23, 2016.
- [13] D. Purnamawati, H. Anadza, and Suyeno, “EFEKTIVITAS PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI MOJOKERTO DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto),” *J. Respon Publik*, vol. 16, no. 6, pp. 11–18, 2022.
- [14] A. Amalana, “Sosialisasi BMT An-Nawawi Purworejo terhadap siswa-siswi untuk menggunakan simpanan pendidikan,” *Hilos Tensados*, vol. 1, no., pp. 1–476, 2016.
- [15] S. Tentang and E. Sukses, “E-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN),” pp. 32–42.

- [16] Husri, J. Usman, and A. Mone, "Efektivitas Aplikasi Program Pendataan Kesejahteraan Sosial Next Generation Di Kabupaten Gowa," *J. Adm. Publik*, vol. 2, pp. 1924–1935, 2021, [Online]. Available: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.